

KATALOG BPS:

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BUNGO**

*Menurut Pengeluaran*  
**Tahun 2013-2017**



<https://bungokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BUNGO**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BUNGO**

*Menurut Pengeluaran*  
**Tahun 2013-2017**



<https://bungokab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BUNGO  
MENURUT PENGELUARAN  
TAHUN 2013- 2017**

Nomor Publikasi : 15090.1641  
Katalog BPS : 9302008.1509

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 55 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo

Gambar Kulit:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo

Diterbitkan Oleh:  
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo

Dicetak Oleh:  
CV. Mella Offset

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BUNGO  
MENURUT PENGELUARAN  
TAHUN 2013- 2017**

---

**Anggota Tim Penyusun:**

Pengarah : Ahmad Fauzie, SE

Editor : Soni Ahmad Wirawan, SST

Penulis : Fatmawati, SE  
Rani Safitri, SE

Pengolah Data: Ike Prasetiwi, SST

<https://bungokab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan, penetapan pajak, kajian ekspor - impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini, sebagaimana publikasi sebelumnya, telah menggunakan tahun dasar 2010 dan menerapkan konsep *System of National Accounts* (SNA) 2008 seperti yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*).

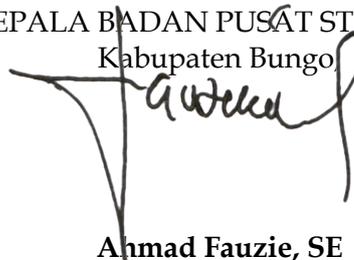
Penghargaan dan ucapan terima kasih diberikan kepada anggota tim penyusun publikasi ini sehingga dapat diterbitkan. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Muara Bungo, Juli 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kabupaten Bungo



Ahmad Fauzie, SE

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
1.3 Kegunaan Statistik PDRB.....	9
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....	10
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	17
2.5 Perubahan Inventori .....	19
2.6 Ekspor dan Impor .....	21
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN REGIONAL KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	23
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran .....	24
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran .....	31
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	31
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT .....	34
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah.....	35
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	36
3.2.5 Perubahan Inventori .....	37
3.2.6 Ekspor-Impor Barang dan Jasa.....	38
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB KABUPATEN BUNGO MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017 .....	40
4.1 PDRB (Nominal).....	41
4.2 Perbandingan PDRB terhadap Impor .....	42
4.3 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan .....	43
BAB V PENUTUP.....	44
LAMPIRAN .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	53

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	25
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	26
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	28
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	30
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017.....	30
Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	31
Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017.....	32
Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	33
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	34
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	35
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017.....	35
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	37
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	38
Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017.....	41
Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	41
Tabel 16. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 .....	43

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017.....	25
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017.....	26
Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017.....	27
Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017.....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	47
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	48
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	49
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	50
Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	51
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 .....	52



<https://bungokab.bps.go.id>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor)

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

## Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

## Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

## Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan

cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

### Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

### **1.3. KEGUNAAN STATISTIK PDRB**

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://bungokab.bps.go.id>

**BAB II**  
**METODA ESTIMASI DAN**  
**SUMBER DATA**

## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

### i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>5</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

<sup>5</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, *umumnya* nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## **2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)**

### **i Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **ii Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

#### iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter.

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

## iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

## iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS

- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

#### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :  $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi :  $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$ .

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula

Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

## v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

### a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

### b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -  
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

## 2.6 EKSPOR - IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut

memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

## **ii Konsep dan definisi**

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

## **iii Cakupan**

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

## **iv Sumber Data**

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



**BAB III**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**  
**KABUPATEN BUNGOMENURUT**  
**PDRB PENGELUARANTAHUN 2013 -2017**

<https://bungokab.go.id>

### 3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Selama periode Tahun 2013-2017 secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo di bandingkan tahun sebelumnya dari tahun ke tahun tidak stabil dan cenderung melambat, namun selama periode tersebut mengalami pertumbuhan di atas 5 persen, yakni sebesar 9,02 persen; 6,74 persen; 5,13 persen; 5,20 persen; dan 5,67 persen. Peningkatan volume ekonomi tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Seperti tahun sebelumnya pada sisi produksi, Kabupaten Bungo sangat tergantung pada pergerakan kategori pertambangan dan penggalian; kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan pada sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Selama periode Tahun 2013-2017 PDRB Kabupaten Bungo selalu mengalami peningkatan. Meskipun, yakni sebesar 10.676,14 miliar Rupiah (2013); 11.808,51 miliar Rupiah (2014); 12.985,94 miliar Rupiah (2015); 14.351,14 miliar Rupiah (2016); dan 16.009,36 miliar Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Komponen PK-RT sebagai penyumbang terbesar bergerak cukup signifikan selama periode 2013 - 2017, yakni sebesar 6.283,86 miliar Rupiah (2013); 6.861,73 miliar Rupiah (2014); 7.331,39 miliar Rupiah (2015); 7.785,96 miliar Rupiah (2016); dan 8.412,59 miliar Rupiah (2017). Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bungo pada periode 2011-2015 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017**

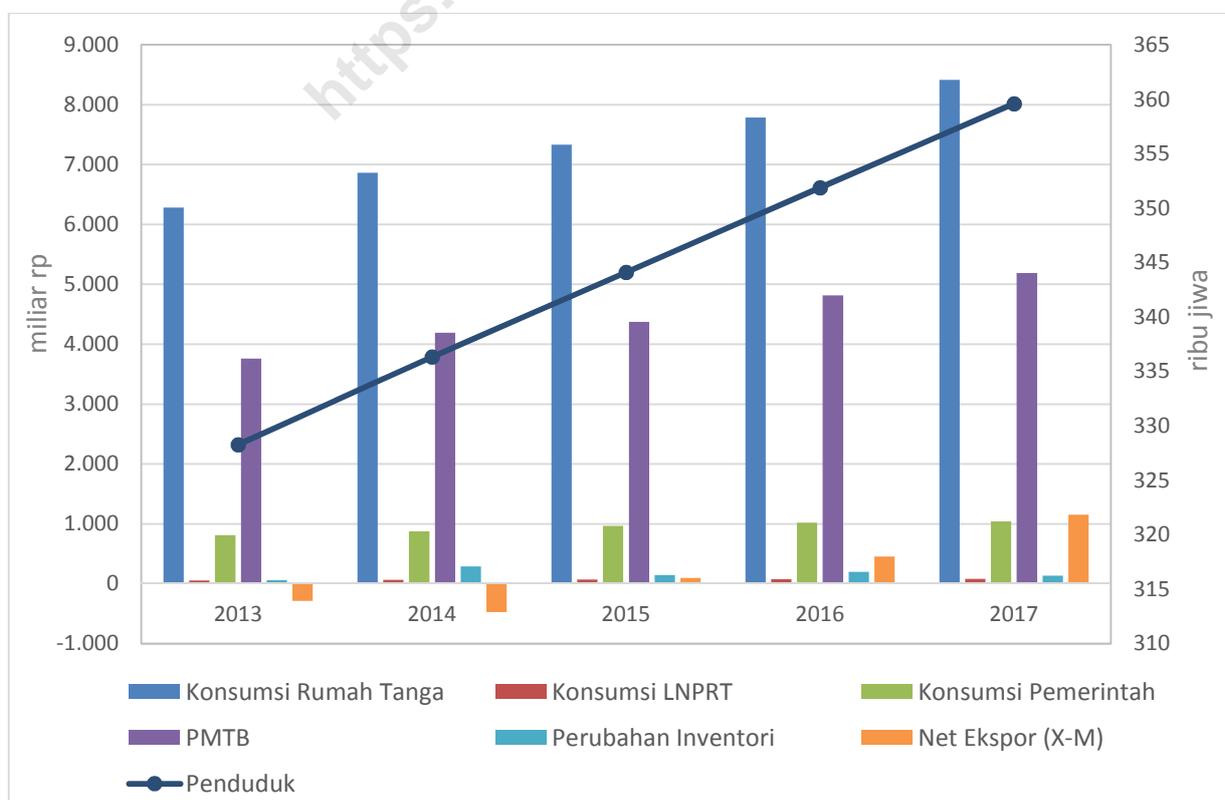
(miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.283,86	6.861,73	7.331,39	7.785,96	8.412,59
2. Konsumsi LNPRT	52,66	63,07	69,16	75,96	82,66
3. Konsumsi Pemerintah	810,28	873,65	966,88	1018,79	1037,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.760,00	4.193,95	4.374,47	4.815,92	5.189,78
5. Perubahan Inventori	58,62	291,22	147,00	198,15	132,98
6. Ekspor	9.592,41	10.675,38	11.864,62	13.269,79	15.287,26
7. Impor	9.881,69	11.150,48	11.767,58	12.813,44	14.133,91
<b>PDRB</b>	<b>10.676,14</b>	<b>11.808,51</b>	<b>12.985,94</b>	<b>14.351,14</b>	<b>16.009,36</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran dan Jumlah Penduduk Tahun 2013- 2017**



Selain dinilai atas dasar hargayang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar hargadari berbagai jenis produk yang divaluaasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaranatas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar hargaKonstan 2010 Kabupaten Bungo pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017**

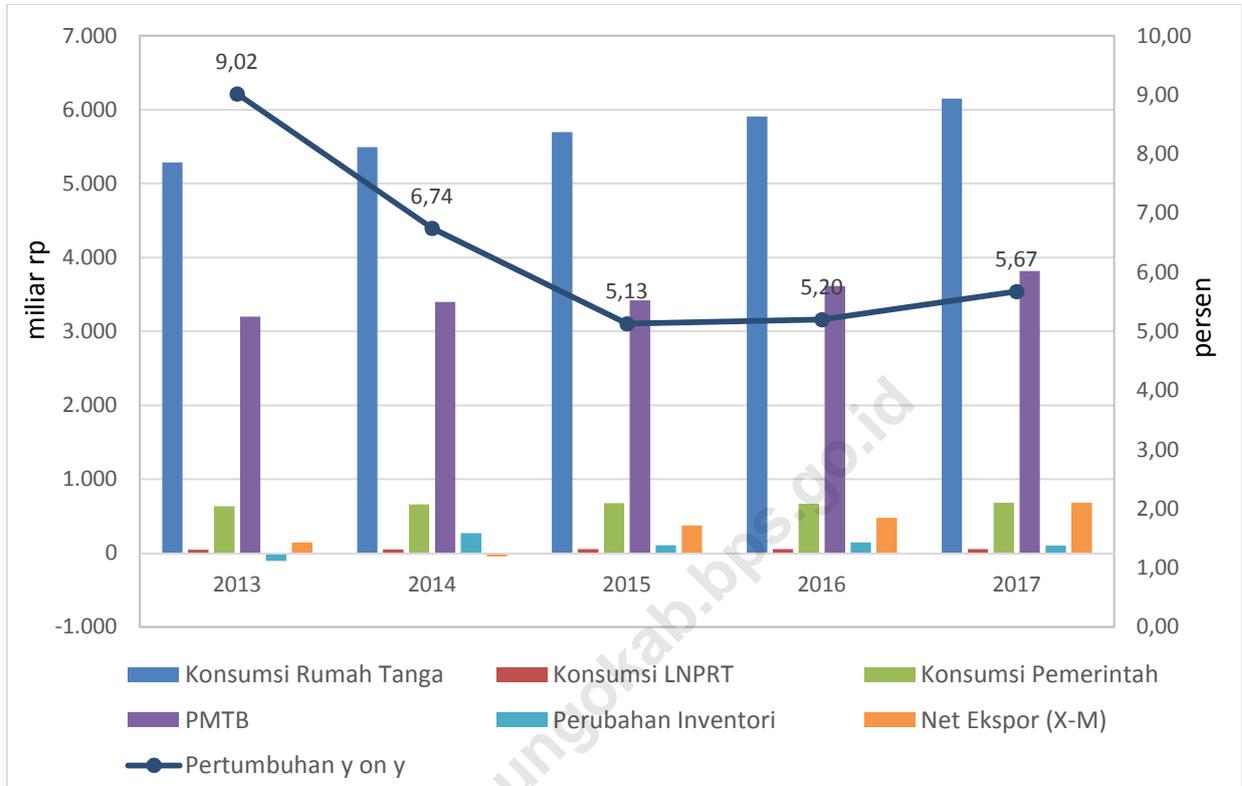
(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.285,75	5.492,84	5.698,65	5.908,56	6.148,49
2. Konsumsi LNPR	44,39	50,69	53,08	54,82	56,40
3. Konsumsi Pemerintah	634,84	658,68	675,89	667,65	681,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.198,70	3.400,07	3.420,96	3.615,64	3.817,02
5. Perubahan Inventori	(102,66)	(269,46)	(108,88)	145,47	104,49
6. Ekspor	8.186,06	8.865,19	9.486,53	10.058,56	10.854,21
7. Impor	8.038,61	8.907,37	9.110,17	9.579,66	10.174,32
<b>PDRB</b>	<b>9.208,47</b>	<b>9.829,56</b>	<b>10.333,80</b>	<b>10.871,03</b>	<b>11.487,95</b>

\*Angka Sementara

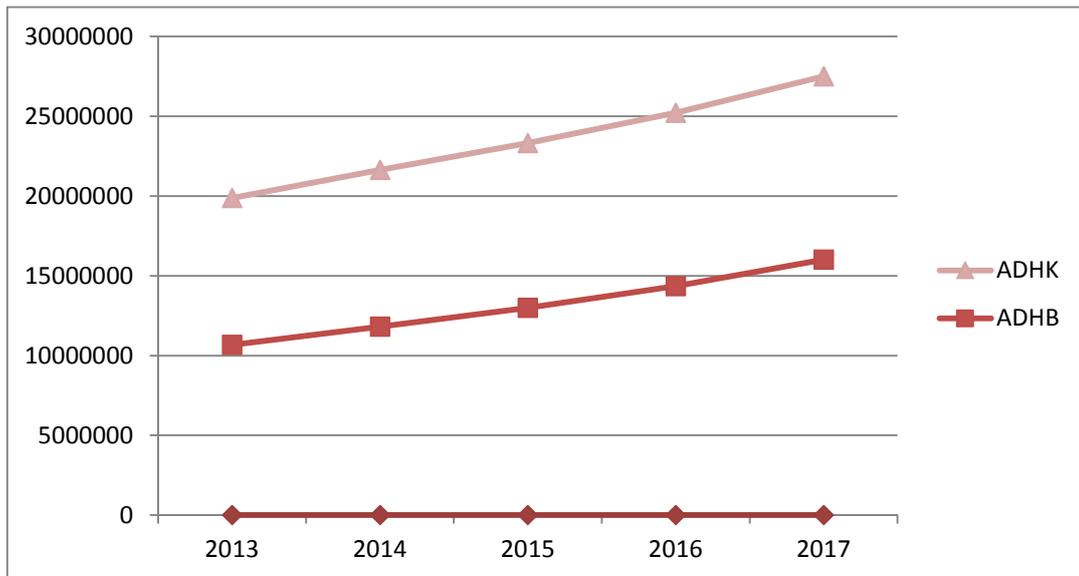
\*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bungo meningkat, yakni sebesar 2.292,73 miliar Rupiah (2013-2014); 2.070,97 miliar Rupiah (2014-2015); 2.058,05 miliar Rupiah (2015-2016); 2.399,26 miliar Rupiah (2016-2017) . Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo cenderung melambat, yakni dari 9,65 persen pada tahun 2012 menjadi 5,20 persen pada tahun 2015. Dua komponen penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Bungo adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

**Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran dan Pertumbuhan PDRB *y on y* Tahun 2011 - 2015**



**Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlakudan Atas Dasar Harga Konstan2010 Menurut PengeluaranKabupaten Bungo Tahun 2013-2017**



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58,86	58,11	56,46	54,25	52,55
2. Konsumsi LNPRT	0,49	0,53	0,53	0,53	0,52
3. Konsumsi Pemerintah	7,59	7,40	7,45	7,10	6,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,22	35,52	33,69	33,56	32,42
5. Perubahan Inventori	(0,55)	(2,47)	1,13	1,38	0,83
6. Ekspor	89,85	90,40	91,37	92,47	95,49
7. Impor	92,56	94,43	90,62	89,29	88,29
<b>PDRB</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

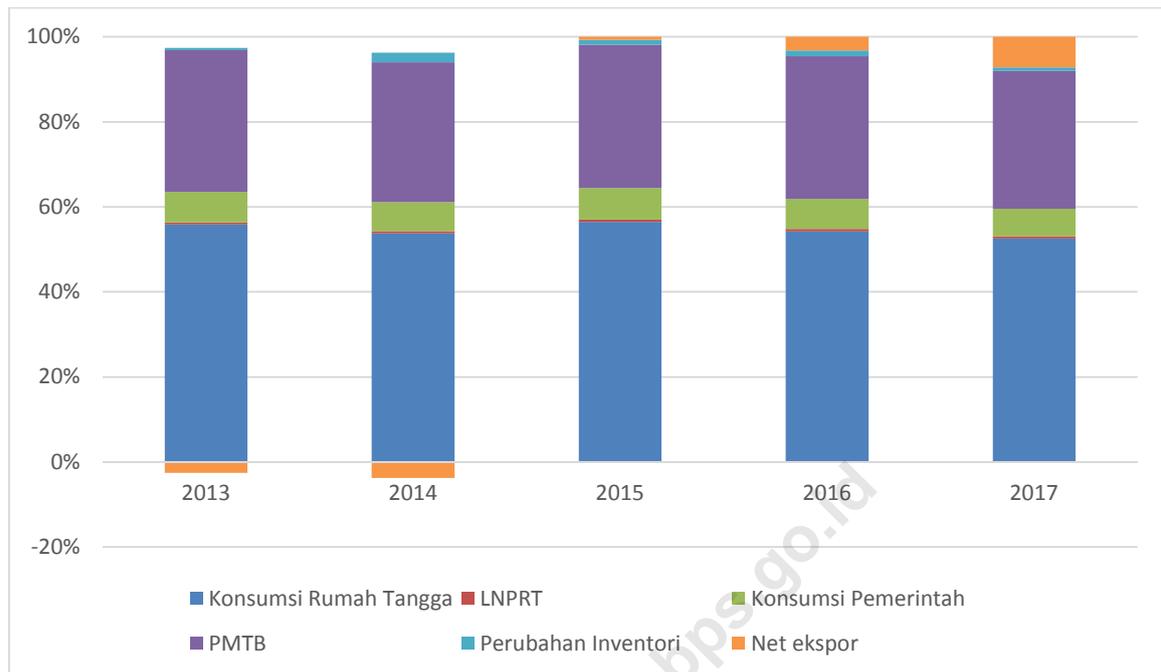
\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Bungo sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 35,22 s.d 33,56 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi cukup besar, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi juga relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Adapun komponen penyumbang PDRB Kabupaten Bungo paling kecil adalah komponen konsumsi LNPRT.

**Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013- 2017**



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 7,59 hingga 7,10 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Konsumsi LNPRT menyumbang sekitar 0,49 - 0,53 persen. Komponen ini merupakan menyumbang PDRB paling kecil. Di sisi lain, pada tahun 2013-2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo mengalami perlambatan, yakni sebesar 9,02 persen (2013); 6,74 persen (2014); 5,13 persen (2015); 5,20 persen (2016); dan 5,67 persen (2017). Sedangkan dari tabel 4 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,53	3,92	3,75	3,68	4,06
2. Konsumsi LNPRT	7,02	14,19	4,71	3,28	2,88
3. Konsumsi Pemerintah	4,13	3,76	2,61	(1,22)	2,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,11	6,30	0,61	5,69	5,57
5. Perubahan Inventori	(24,49)	(362,47)	(59,59)	33,60	(28,17)
6. Ekspor	12,26	8,30	7,01	6,03	7,91
7. Impor	9,38	10,81	2,28	5,15	6,21
<b>PDRB</b>	<b>9,02</b>	<b>6,74</b>	<b>5,13</b>	<b>5,20</b>	<b>5,67</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Indeks implisit<sup>6</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen(rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013- 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	118,88	124,92	128,65	131,77	136,82
2. Konsumsi LNPRT	118,61	124,42	130,30	138,57	146,58
3. Konsumsi Pemerintah	127,64	132,64	143,05	152,59	152,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	117,55	123,35	127,87	133,20	135,96
5. Perubahan Inventori	(57,10)	108,08	135,00	136,22	127,27
6. Ekspor	117,18	120,42	125,07	131,93	140,84
7. Impor	122,93	125,07	129,17	133,76	138,92
<b>PDRB</b>	<b>115,94</b>	<b>120,13</b>	<b>125,66</b>	<b>132,01</b>	<b>139,36</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

<sup>6</sup> Indeks perkembangan

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,30	2,34	2,71	2,25	1,88
2. Konsumsi LNPRRT	0,04	0,04	0,03	0,07	0,04
3. Konsumsi Pemerintah	0,23	0,18	0,30	0,15	0,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,45	5,31	2,37	6,02	0,58
5. Perubahan Inventori	-4,69	2,31	-0,24	4,58	-2,14
6. Ekspor	10,72	9,00	10,09	7,65	-5,88
7. Impor	1,28	9,53	6,24	13,98	-10,37
<b>PDRB</b>	<b>9,74</b>	<b>9,65</b>	<b>9,02</b>	<b>6,74</b>	<b>5,13</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

## 3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Bungo untuk periode 2013 - 2017.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bungo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bungo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.283,86	6.861,73	7.331,39	7.785,96	8.412,59
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.285,75	5.492,84	5.698,64	5.698,65	6.148,49
Proporsi terhadap PDRB( % ADHB)	58,86	58,11	56,46	54,25	52,55
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	19.142,05	20.402,38	21.305,98	22.126,88	23.394,94
b. ADHK 2010	16.101,58	16.332,19	16.561,02	16.791,51	17.098,60
Pertumbuhan <sup>7</sup>					
a. Total konsumsi RT	4,53	3,92	3,75	3,68	4,06
b. Perkapita	2,10	1,43	1,40	1,39	1,83
Jumlah penduduk (jiwa)	328.375	336.320	344.100	351.878	359.590

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Selama periode 2013 - 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung menurun, yaitu 58,86 persen (2013); terjadi penurunan sebesar 0,75 persen di tahun 2014 yaitu sebesar 58,11 persen; tahun 2015 menyumbang 56,46 persen, 54,25 persen di tahun (2016); dan 52,55 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 58,86 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 sebesar 52,55 persen. Pada kondisi idealnya, ketika masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tanggadari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pada periode tahun 2013-2017 angka Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” terus mengalami penurunan yakni sebesar 2,10(2013),1,43 (2014),1,40(2015),1,39(2016) dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 1,83 persen.Hal tersebut berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017 (%)**

Kelompok Konsumsi	2013					2014					2015					2016*					2017**				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	41,40	40,55	40,36	40,88	40,94	41,40	40,55	40,36	40,88	40,94	41,40	40,55	40,36	40,88	40,94	41,40	40,55	40,36	40,88	40,94					
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,54	5,53	5,37	5,22	5,13	5,54	5,53	5,37	5,22	5,13	5,54	5,53	5,37	5,22	5,13	5,54	5,53	5,37	5,22	5,13					
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,60	18,78	19,13	19,14	19,12	17,60	18,78	19,13	19,14	19,12	17,60	18,78	19,13	19,14	19,12	17,60	18,78	19,13	19,14	19,12					
d. Kesehatan & Pendidikan	14,06	14,09	13,80	14,01	14,61	14,06	14,09	13,80	14,01	14,61	14,06	14,09	13,80	14,01	14,61	14,06	14,09	13,80	14,01	14,61					
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,32	17,88	18,25	17,88	17,41	18,32	17,88	18,25	17,88	17,41	18,32	17,88	18,25	17,88	17,41	18,32	17,88	18,25	17,88	17,41					
f. Hotel & Restoran	1,14	1,13	1,18	1,13	1,13	1,14	1,13	1,18	1,13	1,13	1,14	1,13	1,18	1,13	1,13	1,14	1,13	1,18	1,13	1,13					
g. Lainnya	1,94	2,03	1,91	1,74	1,68	1,94	2,03	1,91	1,74	1,68	1,94	2,03	1,91	1,74	1,68	1,94	2,03	1,91	1,74	1,68					
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>																								

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2013 perkembangan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 4,53 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 3,92 persen (2014); 3,75 persen (2015); 3,68 persen (2016); dan 4,06 persen (2017). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun berkisar dari 2,10 hingga 1,83 di tahun 2017. Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih rendah dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 2,4 sampai 2,19.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Meskipun lebih kecil di bandingkan tahun tahun sebelum nya, di periode tahun 2013-2017 harga terus mengalami Peningkatan. Harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,08 persen, pada harga kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yaitu sebesar 11,85 ,Kelompok Hotel dan Restoran 5,09 dan Kelompok lainnya 4,43 persen. Harga terendah di tahun 2016 yaitu sebesar 2,43.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

Kelompok Konsumsi	2013					2014					2015					2016*					2017**				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
a. Makanan, Minuman, dan Rokok		2,86	3,88	3,21	3,89	4,42																			
b. Pakaian dan Alas Kaki		1,65	3,48	-0,42	1,92	3,98																			
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga		5,10	11,85	4,29	2,07	3,65																			
d. Kesehatan & Pendidikan		3,90	4,31	-0,15	2,29	6,47																			
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya		5,58	2,51	5,09	0,70	0,76																			
f. Hotel & Restoran		6,29	5,09	7,74	-0,49	4,79																			
g. Lainnya		6,01	4,43	-2,86	-4,46	2,20																			
Total Konsumsi		3,84	5,08	2,99	2,43	3,83																			

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Kontibusi konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Pengeluaran untuk konsumsi LNPRT mempunyai peranan yang relatif kecil terhadap perekonomian Kabupaten Bungo rata-rata sekitar 0,52 persen. Proporsi LNPRT terhadap PDRB dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu mencapai 0,49 persen (2013); 0,53 persen (2014); 0,53 persen (2015); 0,53 persen (2016); dan 0,52 persen (2015).

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT  
Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	52,66	63,07	69,16	75,96	82,66
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	44,39	50,69	53,08	54,81	56,39
Proporsi terhadap PDRB( % ADHB)	0,49	0,53	0,53	0,53	0,52

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bungo serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah  
Kabupaten Bungo Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	810,28	873,65	966,88	1018,79	1038,00
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	634,84	658,68	675,89	667,65	681,67
Proporsi terhadap PDRB ( % - ADHB)	7,59	7,40	7,45	7,10	6,45
Pertumbuhan <sup>8</sup>	4,13	3,76	2,61	(1,22)	2,10
Total konsumsi pemerintah					
<b>Jumlah penduduk (jiwa)</b>	<b>328.375</b>	<b>336.320</b>	<b>344,100</b>	<b>351.878</b>	<b>359.590</b>

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 810,28 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1038,00 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010 yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun yaitu sebesar 634,84 miliar Rupiah di tahun 2013 hingga mencapai 681,67 miliar rupiah pada tahun 2017 . Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung menurun, dari 7,59 pada tahun 2013 hingga mencapai 6,45 persen pada tahun 2017. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan angka sebesar 4,13 persen namun pertumbuhan semakin melambat sampai tahun 2017 sebesar 2,10 persen.

#### 3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>9</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Proporsi PMTB terhadap total PDRB cenderung meningkat selama periode 2013 – 2017. Perubahan proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi subkomponen bangunan pada tahun 2013 sebesar 24,32 dan mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 26,30 persen, namun mengalami penurunan terus menerus hingga tahun 2017 yaitu sebesar 24,86. Kondisi ini mengalami penurunan tipis menjadi 21,95 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013, di samping itu subkomponen non bangunan juga terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari 10,90 persen hingga 7,56 persen terhadap total PMTB .

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di bawah menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013– 2017 berfluktuasi dari 11,11 persen (2013) menjadi 6,30 persen (2014), kemudian menurun menjadi 0,61 persen (2015), lalu meningkat menjadi 5,69 persen (2016), dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 5,57. Rendahnya pertumbuhan pada tahun 2015 salah satunya diakibatkan oleh

---

<sup>9</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

bencana kekeringan dan kabut asap yang melanda Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Bungo yang menyebabkan rencana penanaman kembali bibit tanaman perkebunan menjadi tertunda.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB  
Kabupaten Bungo Tahun 2013—2017**

<b>U r a i a n</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	3.760,00	4.193,95	4.374,47	4.815,92	5.189,78
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	3.198,70	3.400,07	3.420,96	3.615,64	3.817,02
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35,22	35,52	33,69	33,56	32,42
Struktur PMTB <sup>10</sup>					
a. Bangunan ( <i>Miliar Rp</i> )	2.595,92	3.105,92	3.381,36	3.695,01	3.979,78
(% terhadap total)	24,32	26,30	26,04	25,75	24,86
b. Non Bangunan ( <i>Miliar Rp</i> )	1.164,09	1.088,03	993,11	1.120,91	1.209,89
(% terhadap total)	10,90	9,21	7,65	7,81	7,56
Total PMTB ( <i>Miliar Rp</i> )	3.760,00	4.193,95	4.374,47	4.815,92	5.189,78
(% terhadap total)	35,22	35,52	33,69	33,56	32,42
Pertumbuhan <sup>11</sup> (%)	11,11	6,30	0,61	5,69	5,57
Total PMTB					

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

<sup>10</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB )

<sup>11</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  
Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	58,62	291,22	147,00	198,15	132,98
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	-102,66	269,46	108,88	145,47	104,49
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,55	(2,00)	1,13	1,38	0,83

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 58,62 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 291,22 miliar rupiah, di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 147,00 miliar rupiah. Pada tahun 2016 perubahan inventori meningkat dari tahun sebelum aya sebesar 198,15 miliar rupiah, tahun 2017 kembali turun mencapai 132,98,00 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Bungo fluktuasi. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 cenderung meningkat namun kembali menurun di tahun 2017, proporsi perubahan inventori adalah 0,55 persen (2013), selanjutnya (2,00) persen (2014), 1,13 persen (2015), 1,38 persen (2016), dan 0,83 persen (2017).

### 3.2.6. Ekspor-Impor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan

antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.



**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT**  
**PDRB KABUPATEN BUNGO**  
**MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013 -2017**

<https://bungokab.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bungo, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10.676,14	11.808,51	12.985,94	14.351,14	16.009,36
- ADHK 2010	9.208,47	9.829,56	10.333,81	10.871,04	11.487,95
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	32.521,93	35.110,95	37.738,85	40.784,41	44.521,16
- ADHK 2010	28.051,08	29.226,81	30.031,41	30.894,34	31.941,36
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	3,84	4,19	2,75	2,87	3,41
Jumlah penduduk (000 org)	328.275	336.320	344.100	351.878	359.590
Pertumbuhan	2,39	2,45	2,31	2,26	2,19

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Bungo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 14), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Bungo rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2,4-2,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

#### 4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	6.283,86	6.861,73	7.331,39	7.785,96	8.412,59
b. LNPRT	52,66	63,07	69,16	75,96	82,66
c. Pemerintah	810,28	873,65	966,88	1.018,79	1.038,00
Jumlah	7.146,80	7.798,45	8.367,42	8.880,72	9.533,25
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	10.676,14	11.808,51	12.985,94	14.351,14	16.009,36
<b>Proporsi</b>	66,94	66,04	64,43	61,88	59,55

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Dengan kata lain, peranan komponen investasi dan net ekspor mengalami peningkatan, walaupun dalam segi persentase masih memiliki angka yang relatif kecil.

### 4.3 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 16. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Bungo Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Penyediaan</b>					
PDRB (ADHB)	10.676,14	11.808,51	12.985,94	14.351,14	16.009,36
(Miliar Rp)					
%	66,94	66,04	64,43	61,88	59,55
<b>Total nilai Impor ADHB</b>					
(Miliar Rp)	9,881,69	11.150,48	11.767,58	12.813,44	14.133,91
%	32,46	32,69	32,22	32,05	31,92
<b>Total Permintaan Akhir<sup>12</sup></b>	20.557,83	22.958,99	24.753,52	27.164,58	30.143,27
(Miliar Rp)					
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

\*Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, dengan rentang 31 s.d. 33 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 66 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 20.557,83 miliar rupiah (2013) menjadi sebesar 30.143,27 miliar rupiah (2017).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 10.676,14 miliar rupiah (2013); 11.808,51 miliar rupiah (2014); 12.985,94 miliar rupiah (2015); 14.351,14 miliar rupiah (2016); dan 16.009,36 miliar rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 9.881,69 miliar rupiah (2013); 11.150,48 miliar rupiah (2014); 11.767,58 miliar rupiah (2015); 12.813,44 miliar rupiah (2016); dan 14.133,91 miliar rupiah (2017).

<sup>12</sup> Termasuk diskrepani statistik

<https://bungokab.bps.go.id>

**BAB V**  
**PENUTUP**

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bungo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2011 s.d 2015, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bungo terhadap ekonomi luar daerah.



<https://bungokab.bps.go.id>

**LAMPIRAN**

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo ADHB Menurut Pengeluaran,2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)</b>	<b>6.283,86</b>	<b>6.861,73</b>	<b>7.331,39</b>	<b>7.785,96</b>	<b>8.412,59</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.601,47	2.782,37	2.959,26	3.183,11	3.443,80
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	348,11	379,52	393,90	406,44	431,49
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.105,93	1.288,89	1.402,32	1.489,91	1.608,08
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	883,81	967,13	1.011,76	1.091,12	1.228,75
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.150,98	1.227,08	1.338,07	1.392,05	1.464,31
1.f. Hotel dan Restoran	71,60	77,79	86,16	88,18	95,13
1.g. Lainnya	121,96	138,95	139,91	135,14	141,03
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>52,66</b>	<b>63,07</b>	<b>69,16</b>	<b>75,96</b>	<b>82,66</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>810,28</b>	<b>873,65</b>	<b>966,88</b>	<b>1.018,79</b>	<b>1.038,00</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>3.760,00</b>	<b>4.193,95</b>	<b>4.374,47</b>	<b>4.815,92</b>	<b>5.189,78</b>
4.a. Bangunan	2.595,92	3.105,92	3.381,36	3.695,01	3.979,89
4.b. Non-Bangunan	1.164,09	1.088,03	993,11	1.120,91	1.209,89
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>58,62</b>	<b>291,22</b>	<b>147,00</b>	<b>198,15</b>	<b>132,98</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>9.592,41</b>	<b>10.675,38</b>	<b>11.864,62</b>	<b>13.269,79</b>	<b>15.287,26</b>
<b>7. Impor</b>	<b>9.881,69</b>	<b>11.150,48</b>	<b>11.767,58</b>	<b>12.813,44</b>	<b>14.133,91</b>
<b>P D R B</b>	<b>10.676,14</b>	<b>11.808,51</b>	<b>12.985,94</b>	<b>14.351,14</b>	<b>16.009,36</b>

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo ADHK Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)</b>	<b>5.285,75</b>	<b>5.492,84</b>	<b>5.698,65</b>	<b>5.908,56</b>	<b>6.148,49</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.082,88	2.144,57	2.209,91	2.288,14	2.370,74
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	299,34	315,38	328,72	332,78	339,77
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	946,85	986,55	1.029,26	1.071,36	1.115,61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	759,27	796,55	834,59	879,91	930,68
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.042,74	1.084,45	1.125,31	1.162,53	1.213,63
1.f. Hotel dan Restoran	59,47	61,48	63,21	65,01	66,93
1.g. Lainnya	95,19	103,85	107,65	108,83	111,13
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>44,39</b>	<b>50,69</b>	<b>53,08</b>	<b>54,82</b>	<b>56,40</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>634,84</b>	<b>658,68</b>	<b>675,89</b>	<b>667,65</b>	<b>681,67</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>3.198,70</b>	<b>3.400,07</b>	<b>3.420,96</b>	<b>3.615,64</b>	<b>3.817,02</b>
4.a. Bangunan	2.203,03	2.557,68	2.650,18	2.773,86	2.948,62
4.b. Non-Bangunan	995,68	842,39	770,78	841,78	868,40
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-102,66</b>	<b>269,46</b>	<b>108,88</b>	<b>145,47</b>	<b>104,49</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>8.186,06</b>	<b>8.865,19</b>	<b>9.486,53</b>	<b>10.058,56</b>	<b>10.854,21</b>
<b>7. Impor</b>	<b>8.038,61</b>	<b>8.907,37</b>	<b>9.110,17</b>	<b>9.579,66</b>	<b>10.174,32</b>
<b>P D R B</b>	<b>9.208,47</b>	<b>9.829,56</b>	<b>10.333,81</b>	<b>10.871,04</b>	<b>11.487,95</b>

<b>Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Bungo ADHB Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)</b>					
<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)</b>	<b>58,86</b>	<b>58,11</b>	<b>56,46</b>	<b>54,25</b>	<b>52,55</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,37	23,56	22,79	22,18	21,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,26	3,21	3,03	2,83	2,70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,36	10,91	10,80	10,38	10,04
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,28	8,19	7,79	7,60	7,68
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,78	10,39	10,30	9,70	9,15
1.f. Hotel dan Restoran	0,67	0,66	0,66	0,61	0,59
1.g. Lainnya	1,14	1,18	1,08	0,94	0,88
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0,49</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,52</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>7,59</b>	<b>7,40</b>	<b>7,45</b>	<b>7,10</b>	<b>6,48</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>35,22</b>	<b>35,52</b>	<b>33,69</b>	<b>33,56</b>	<b>32,42</b>
4.a. Bangunan	24,32	26,30	26,04	25,75	24,86
4.b. Non-Bangunan	10,90	9,21	7,65	7,81	7,56
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>0,55</b>	<b>2,47</b>	<b>1,13</b>	<b>1,38</b>	<b>0,83</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>89,85</b>	<b>90,40</b>	<b>91,37</b>	<b>92,47</b>	<b>95,49</b>
<b>7. Impor</b>	<b>92,56</b>	<b>94,43</b>	<b>90,62</b>	<b>89,29</b>	<b>88,29</b>
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo ADHK Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)</b>	<b>4,53</b>	<b>3,92</b>	<b>3,75</b>	<b>3,68</b>	<b>4,06</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,15	2,96	3,05	3,54	3,61
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,79	5,36	4,23	1,24	2,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,29	4,19	4,33	4,09	4,13
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,50	4,91	4,78	5,43	5,77
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,52	4,00	3,77	3,31	4,40
1.f. Hotel dan Restoran	2,71	3,39	2,80	2,85	2,95
1.g. Lainnya	1,02	9,10	3,66	1,09	2,11
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>7,02</b>	<b>14,19</b>	<b>4,71</b>	<b>3,28</b>	<b>2,88</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>4,13</b>	<b>3,76</b>	<b>2,61</b>	<b>-1,22</b>	<b>2,10</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>11,11</b>	<b>6,30</b>	<b>0,61</b>	<b>5,69</b>	<b>5,57</b>
4.a. Bangunan	17,34	16,10	3,62	4,67	6,30
4.b. Non-Bangunan	-0,56	-15,40	-8,50	9,21	3,16
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>24,49</b>	<b>-362,47</b>	<b>-59,59</b>	<b>33,60</b>	<b>-28,17</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>12,26</b>	<b>8,30</b>	<b>7,01</b>	<b>6,03</b>	<b>7,91</b>
<b>7. Impor</b>	<b>9,38</b>	<b>10,81</b>	<b>2,28</b>	<b>5,15</b>	<b>6,21</b>
<b>P D R B</b>	<b>9,02</b>	<b>6,74</b>	<b>5,13</b>	<b>5,20</b>	<b>5,67</b>

<b>Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran, 2013-2017</b>					
<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)</b>	<b>118,88</b>	<b>124,92</b>	<b>128,65</b>	<b>131,77</b>	<b>136,82</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	124,90	129,74	133,91	139,11	145,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	116,29	120,34	119,83	122,13	126,99
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	116,80	130,65	136,25	139,07	144,14
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	116,40	121,41	121,23	124,00	132,03
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	110,38	113,15	118,91	119,74	120,66
1.f. Hotel dan Restoran	120,40	126,52	136,31	135,65	142,14
1.g. Lainnya	128,12	133,80	129,96	124,17	126,91
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>118,61</b>	<b>124,42</b>	<b>130,30</b>	<b>138,57</b>	<b>146,58</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>127,64</b>	<b>132,64</b>	<b>143,05</b>	<b>152,59</b>	<b>152,27</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>117,55</b>	<b>123,35</b>	<b>127,87</b>	<b>133,20</b>	<b>135,96</b>
4.a. Bangunan	117,83	121,44	127,59	133,21	134,97
4.b. Non-Bangunan	116,91	129,16	128,85	133,16	139,32
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-57,10</b>	<b>108,08</b>	<b>135,00</b>	<b>136,22</b>	<b>127,27</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>117,18</b>	<b>120,42</b>	<b>125,07</b>	<b>131,93</b>	<b>140,84</b>
<b>7. Impor</b>	<b>122,93</b>	<b>125,18</b>	<b>129,17</b>	<b>133,76</b>	<b>138,92</b>
<b>P D R B</b>	<b>115,94</b>	<b>120,13</b>	<b>125,66</b>	<b>132,01</b>	<b>139,36</b>

**Tabel 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)</b>	<b>3,84</b>	<b>5,08</b>	<b>2,99</b>	<b>2,43</b>	<b>3,83</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,86	3,88	3,21	3,89	4,42
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,65	3,48	-0,42	1,92	3,98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,10	11,85	4,29	2,07	3,65
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,90	4,31	-0,15	2,29	6,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,58	2,51	5,09	0,70	0,76
1.f. Hotel dan Restoran	6,29	5,09	7,74	-0,49	4,79
1.g. Lainnya	6,01	4,43	-2,86	-4,46	2,20
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>6,81</b>	<b>4,90</b>	<b>4,72</b>	<b>6,35</b>	<b>5,77</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>4,27</b>	<b>3,92</b>	<b>7,85</b>	<b>6,67</b>	<b>-0,21</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)</b>	<b>10,32</b>	<b>4,94</b>	<b>3,67</b>	<b>4,16</b>	<b>2,08</b>
4.a. Bangunan	8,73	3,06	5,07	4,40	1,33
4.b. Non-Bangunan	13,36	10,47	-0,24	3,35	4,63
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-164,86</b>	<b>-289,28</b>	<b>24,92</b>	<b>0,90</b>	<b>-6,57</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>0,30</b>	<b>2,76</b>	<b>3,86</b>	<b>5,48</b>	<b>6,76</b>
<b>7. Impor</b>	<b>6,72</b>	<b>1,83</b>	<b>3,18</b>	<b>3,55</b>	<b>3,86</b>
<b>P D R B</b>	<b>1,69</b>	<b>3,62</b>	<b>4,60</b>	<b>5,05</b>	<b>5,56</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara



<https://bungokab.bps.go.id>

***DAFTAR PUSTAKA***

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev.1, New York, 1973.
17. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama *Asian Development Bank* dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bungokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BUNGO**

Jl. RM. Thaher Muara Bungo 37214

Telp: (0747) 21120, Fax : (0747) 21120

E-mail : [bps1509@bps.go.id](mailto:bps1509@bps.go.id) Homepage : <http://www.bungokab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6368-84-3



9 786026 368843